

Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA Tahun Pelajaran 2012-2013 di SMP Negeri 3 Gresik

Sholikin
Guru SMP Negeri 3 Gresik
E-mail: sholikin89@yahoo.co.id

Abstract: This study used qualitative approach. Based on the results of analysis, it can be known that the implementation of policy of remedial teaching at SMP Negeri 3 Gresik carries out quite well. The supporting factors of the implementation of that policy are: 1). communication; clarity and certainty of the information work well, 2). The ability of resource carries out quite well, 3). The attitude of implementer is evaluated quite well, and 4). The structure of bureaucracy carries out optimally. Meanwhile, inhibiting factors are: 1). The consistency of information conveyance has not been implemented well. 2). The information resource; most of teachers have not utilized the information resource from internet as well as from other resources. And 3). The attitude of implementer; there are teachers who have not been responsible and consistent in implementing remedial teaching policy.

Keywords: implementation, policy, remedial teaching

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisa maka, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan remedial teaching di SMP Negeri 3 Gresik. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut antara lain : 1). komunikasi; kejelasan dan kepastian informasi berjalan baik, 2). kemampuan sumber daya; berjalan cukup baik, 3). sikap pelaksana; dinilai cukup baik, dan 4). struktur birokrasi; berjalan optimal. Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain : 1). konsistensi penyampaian informasi; belum dilaksanakan dengan baik. 2). sumber daya informasi; ada sebagian guru belum memanfaatkan sumber informasi dari internet maupun sumber lainnya. dan 3). sikap pelaksana; ada guru belum bertanggung jawab dan belum konsisten dalam melaksanakan kebijakan remedial teaching.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, remedial teaching

Remedial Teaching merupakan salah satu metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa terutama bagi siswa yang belum berhasil dalam hal pencapaian kompetensi (Depdiknas, 2008). Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Untuk memahami konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial, terlebih dahulu perlu diperhatikan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Negeri 3 Gresik menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bintek KTSP tahun 2008 dan 2009 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA ditemukan bahwa pada umumnya guru telah melaksanakan remedial tetapi tidak melalui analisis hasil belajar peserta didik. Selain itu sering ditemukan guru memberi tes ulang dengan soal-soal yang sama terhadap semua peserta didik yang belum mencapai ketuntasan tanpa melakukan pembelajaran ulang, tugas, bimbingan, pemanfaatan teman sejawat dan tanpa memperhatikan indikator yang belum dikuasai oleh masing-masing peserta didik (Direktorat Pembinaan SMA, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini dikarenakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh karena, tujuan dari penelitian ini, yaitu peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisa tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA Tahun Pelajaran 2012-2013 di SMP Negeri 3 Gresik. Adapun dasar teori ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep atau teori yang dikemukakan oleh George Edward III.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2011) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gresik. Waktu pelaksanaannya berkisar semester genap tahun 2013, dengan objek penelitian adalah kepala sekolah, urusan kurikulum dan guru IPA di SMP Negeri 3 Gresik.

Hasil Penelitian

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Gresik, kebijakan tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada guru selaku pelaksana pendidikan. Implementasi kebijakan remedial teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pelatihan yang dimiliki oleh sekolah. Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

Proses Komunikasi

Proses komunikasi yang berlangsung antara Kepala Sekolah, urusan kurikulum, narasumber dengan pelaksana kebijakan guru sudah transparan sehingga tercipta hubungan yang harmonis sebagai pelaksana kebijakan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan remedial teaching.

Kejelasan dan kepastian informasi mengenai implementasi kebijakan remedial teaching merupakan wujud dari sekolah untuk memberikan informasi yang prima sebagai bentuk tanggung-jawab sekolah. Dari hasil wawancara dengan guru menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh sekolah mengenai implementasi kebijakan remedial teaching dapat memudahkan guru dalam melaksanakannya.

Konsistensi informasi implementasi kebijakan remedial teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu guru yang menyatakan bahwa kepala sekolah, urusan kurikulum tidak secara periodik menyampaikan informasi kebijakan remedial teaching, sehingga implementasinya ada yang tidak sesuai prosedur.

Kemampuan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Gresik dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching ini meliputi, Kepala Sekolah, Urusan Kurikulum, Guru dengan jumlah memadai yang disertai dengan kualitas yang baik, finansial dan fasilitas yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru menyatakan bahwa, sekolah mendatangkan narasumber yang kompeten dari LPMP Jawa Timur. Urusan Kurikulum berperan aktif memberikan informasi kepada para guru dalam mengikuti sosialisasi remedial teaching.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti masih ada beberapa guru dalam mengakses informasi tentang kebijakan remedial teaching masih terbatas dari sekolah melalui rapat-rapat dinas, belum memanfaatkan sumber informasi dari internet maupun sumber lainnya.

Pengembangan sumber daya informasi di SMP Negeri 3 Gresik berdasarkan pengamatan peneliti sudah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Informasi-informasi yang terkait dengan warga sekolah dilaporkan melalui seluler secara online. Pada beberapa area sudah terpasang hotspot untuk koneksi ke jaringan internet. Sehingga memudahkan warga sekolah terutama guru-guru untuk mencari sumber informasi melalui internet. Berdasarkan wawancara peneliti dengan subyek, mereka tidak menggunakan perpustakaan sekolah sebagai sumber daya informasi. Subyek belum memprioritaskan website sekolah sebagai sumber informasi. Subyek lebih banyak menggunakan fasilitas internet untuk mencari informasi tambahan berkaitan dengan implementasi remedial teaching.

Dalam implementasi kebijakan *Remedial Teaching* yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Gresik, wewenang yang dimiliki oleh masing-masing personil bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, wewenang yang diberikan oleh Kepala Sekolah kepada Urusan Kurikulum maupun Guru tidak mengalami kendala.

Namun ada beberapa catatan wewenang yang diberikan sering disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti ada sebagian guru yang belum melaksanakan remedial teaching dengan benar. Sekolah belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman, pendalaman, arah respon kebijakan, dan intensitas kebijakan (Winarno, 2012). Pelaksanaannya efektif, para pelaksana mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kepala Sekolah dan urusan kurikulum melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Kepala sekolah/urusan kurikulum komitmen, bertanggungjawab dan memantau dalam implementasinya.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa guru kurang berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan remedial teaching. Implementasi remedial teaching belum sesuai dengan prosedur yang benar.

Struktur Birokrasi

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup banyak keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan Remedial Teaching mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh sekolah.

Hal-hal yang Mendukung

a. Komunikasi

Penyaluran informasi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Gresik ditujukan kepada sasaran yang tepat yaitu guru yang ada di lingkungan SMP Negeri 3 Gresik untuk memperoleh perkembangan informasi tentang kebijakan remedial teaching secara cepat. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan sesuai dengan sasaran (Budi Winarno, 2012). Proses komunikasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Gresik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mudah dimengerti.

Kejelasan dan kepastian informasi mengenai Kebijakan Remedial Teaching sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon para guru karena membantu mempermudah proses remedial teaching.

b. Kemampuan Sumber Daya

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), bahwa sumber daya merupakan faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya ini meliputi, Kepala Sekolah, urusan kurikulum, guru dan sumber daya informasi.

Sumber daya yang ada di SMP Negeri 3 Gresik dalam proses Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA telah berjalan cukup baik.

c. Sikap Pelaksana

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya personil yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga personil yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan (Winarno, 2012).

Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik dinilai cukup baik karena Kepala Sekolah dan Urusan Kurikulum melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Kepala sekolah/urusan kurikulum komitmen, bertanggungjawab dan memantau dalam implementasinya. Tetapi sikap pelaksana dalam hal ini guru perlu mendapat perhatian dari Kepala Sekolah karena ada beberapa guru dalam melaksanakan implementasi remedial teaching belum sesuai dengan prosedur yang benar.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, di sini terlihat bahwa betapa pentingnya struktur birokrasi karena dalam rangkaian birokrasi implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan (Winarno, 2012).

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari SOP yang terdapat pada SMP Negeri 3 Gresik berjalan cukup baik yang berdampak positif terhadap proses remedial teaching. Kemudian adanya tanggung jawab dari personil SMP Negeri 3 Gresik dinilai cukup baik dalam melaksanakan implementasi Remedial Teaching mata pelajaran IPA.

Kendala-Kendala

a. Konsistensi Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh keterangan bahwa konsistensi informasi Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik belum dilaksanakan dengan baik. Sekolah belum konsisten memberikan informasi kepada guru tentang kebijakan remedial teaching, misalnya perlu jadwal secara khusus dan terus menerus setiap awal semester atau awal tahun pelajaran untuk mengingatkan para guru.

b. Sumber Daya Informasi

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti masih ada guru dalam mengakses informasi tentang kebijakan remedial teaching masih terbatas dari sekolah melalui rapat-rapat dinas, belum memanfaatkan sumber informasi dari internet maupun sumber lainnya.

c. Sikap Pelaksana

Berdasarkan pengamatan peneliti masih ada guru belum bertanggungjawab dan belum konsisten dalam melaksanakan kebijakan remedial teaching. Sebagian guru tersebut belum melaksanakan remedial teaching sesuai prosedur.

Solusi untuk Mengatasi Kendala-Kendala

a. Konsistensi Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sekolah belum mempunyai solusi untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek konsistensi penyampaian informasi implementasi kebijakan Remedial Teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik.

b. Sumber Daya Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan solusi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek sumber daya informasi di antaranya adalah mengadakan pelatihan IT bagi guru-guru, melakukan tutor sebaya untuk penggunaan IT, pemasangan hotspot/wifi pada beberapa titik di area sekolah sehingga memudahkan guru-guru untuk mengakses internet.

c. Sikap Pelaksana

Solusi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek sikap pelaksana adalah pembinaan kepada pelaksana/guru oleh Kepala Sekolah dan setiap akhir semester guru-guru diminta oleh Kepala Sekolah melalui Urusan Kurikulum untuk mengumpulkan hasil remedi.

Pembahasan

Hal-hal yang Mendukung

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap para pelaksana (*Dispositions or Attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

a. Proses Komunikasi

Untuk lebih jelasnya, mengenai proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik adalah sebagai berikut:

1) Transmisi atau Penyampaian Informasi dalam Implementasi Kebijakan

Ditegaskan oleh Edward III dalam Winarno (2012), komunikasi perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target*

group) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Penyaluran informasi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Gresik ditujukan kepada sasaran yang tepat yaitu guru yang ada di lingkungan SMP Negeri 3 Gresik untuk memperoleh perkembangan informasi tentang kebijakan remedial teaching secara cepat. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan sesuai dengan sasaran (Budi Winarno, 2012). Proses komunikasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Gresik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mudah dimengerti.

Proses pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 3 Gresik, Urusan Kurikulum maupun Narasumber mengenai kebijakan remedial teaching sudah dinilai baik, namun sebagai masukan perlu penyampaian secara berkala atau terus-menerus misalnya setiap awal semester atau tahun pelajaran baru.

2) Kejelasan Informasi dalam Implementasi Kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik

Jika suatu kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat, mengenali maksud dan tujuan kebijakan (Winarno, 2012).

Kejelasan dan kepastian informasi mengenai Kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari respon para guru karena membantu mempermudah proses remedial teaching.

3) Konsistensi Penyampaian Informasi dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten terhadap tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melanggar dari ketentuan di dalam pelaksanaannya. Konsistensi informasi dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pengimplementasi mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh keterangan bahwa konsistensi informasi Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik belum dilaksanakan dengan baik. Sekolah belum konsisten memberikan informasi kepada guru tentang kebijakan remedial teaching, misalnya perlu jadwal secara khusus dan terus menerus setiap awal semester atau awal tahun pelajaran untuk mengingatkan para guru.

b. Kemampuan Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan salah satu dari bagian sumber daya yang keberadaannya paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong suatu kebijakan itu efektif. Demikian pula bila kekurangan. Suatu kebijakan akan dapat berjalan efektif bila jumlah manusia mencukupi untuk pelaksanaan (Winarno, 2012).

Pengembangan sumber daya manusia diterapkan, supaya personil mendapatkan pelatihan khusus dalam penggunaan internet sebagai salah satu sumber informasi khususnya dalam Implementasi Remedial Teaching.

2) Sumber Daya Informasi

Pengembangan sumberdaya informasi di SMP Negeri 3 Gresik berdasarkan pengamatan peneliti sudah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Informasi-informasi yang terkait dengan warga sekolah dilaporkan melalui seluler secara online. Pada beberapa area sudah terpasang hotspot untuk koneksi ke jaringan internet. Sehingga memudahkan warga sekolah terutama guru-guru untuk mencari sumber informasi melalui internet.

3) Kewenangan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), dalam implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki oleh masing-masing personil harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Urusan Kurikulum, wewenang yang diberikan oleh Kepala Sekolah kepada Urusan Kurikulum maupun Guru tidak mengalami kendala. Namun ada beberapa catatan wewenang yang diberikan sering disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti ada sebagian guru yang belum melaksanakan remedial teaching dengan benar. Sekolah belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

c. Sikap Pelaksana

Sikap/perilaku pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan mental kerja serta kemampuan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Winarno,2012).

Mengenai sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik dinilai cukup baik karena Kepala Sekolah dan Urusan Kurikulum melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Kepala sekolah/urusan kurikulum komitmen, bertanggungjawab dan memantau dalam implementasinya. Namun ada yang perlu mendapat perhatian adalah sikap beberapa guru dalam implementasi belum tumbuh kemauan secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, di sini terlihat bahwa betapa pentingnya struktur birokrasi karena dalam rangkaian birokrasi implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Remedial Teaching di SMP Negeri 3 Gresik berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari SOP yang terdapat pada SMP Negeri 3 Gresik berjalan baik yang berdampak positif terhadap proses remedial teaching. Kemudian adanya tanggung jawab dari personil SMP Negeri 3 Gresik dinilai cukup baik dalam melaksanakan implementasi Remedial Teaching mata pelajaran IPA.

Kendala-Kendala

a. Konsistensi Penyampaian Informasi

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), fenomena pertama yang diamati dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi. Informasi tentang kebijakan remedial teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh keterangan bahwa konsistensi informasi Implementasi Kebijakan Remedial Teaching pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik belum dilaksanakan dengan baik. Sekolah belum konsisten memberikan informasi kepada guru tentang kebijakan remedial teaching, misalnya perlu jadwal secara khusus dan terus menerus setiap awal semester atau awal tahun pelajaran untuk mengingatkan para guru.

b. Sumber Daya Informasi

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2012), fenomena pengamatan kedua dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan remedial teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti masih ada guru dalam mengakses informasi tentang kebijakan remedial teaching masih terbatas dari sekolah melalui rapat-rapat dinas, belum memanfaatkan sumber informasi dari internet maupun sumber lainnya.

c. Sikap Pelaksana

Menurut Winarno (2012), sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para implementor selain mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan itu, mereka juga harus memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti masih ada guru belum bertanggungjawab dan belum konsisten dalam melaksanakan kebijakan remedial teaching. Sebagian guru tersebut belum melaksanakan remedial teaching sesuai prosedur.

Solusi untuk Mengatasi Kendala-Kendala

a. Konsistensi Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sekolah belum mempunyai solusi untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek konsistensi penyampaian informasi implementasi kebijakan Remedial Teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik.

Kondisi ini merupakan titik kelemahan yang segera diambil langkah tindak lanjut. Komunikasi suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas dan secara terus-menerus disampaikan kepada pelaksana.

b. Sumber Daya Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan solusi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek sumber daya informasi di antaranya adalah mengadakan pelatihan IT bagi guru-guru, melakukan tutor sebaya untuk penggunaan IT, pemasangan hotspot/wifi pada beberapa titik di area sekolah sehingga memudahkan guru-guru untuk mengakses internet.

Langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi masalah ini merupakan langkah maju. Harapan ke depan semua pelaksana sudah menjadikan IT sebagai salah satu kebutuhan sumber informasi.

c. Sikap Pelaksana

Solusi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi faktor yang menghambat dari aspek sikap pelaksana adalah pembinaan kepada pelaksana/guru oleh Kepala Sekolah dan setiap akhir semester guru-guru diminta oleh Kepala Sekolah melalui Urusan Kurikulum untuk mengumpulkan hasil remedi. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah diharapkan pada pelaksana/guru tumbuh kesadaran dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Saran

Adapun saran-saran yang diusulkan penulis antara lain:

1. Komunikasi yang perlu dilakukan oleh personil yaitu penyampaian informasi yang konsisten jangan hanya menyampaikan informasi disaat awal kebijakan tersebut berlaku.
2. Sumber daya yang ada di SMP Negeri 3 Gresik perlu ditingkatkan untuk penguasaan IT sehingga sumber informasi semakin banyak.
3. Sikap personil dalam menjalankan kebijakan remedial teaching pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Gresik terkadang tidak disiplin, perlu pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan dapat melaksanakan remedial teaching sesuai dengan prosedur sehingga pelaksanaan remedial teaching dapat maksimal.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaannya personil terkadang tidak mematuhi SOP, dan terkadang Kepala Sekolah selaku penanggungjawab tidak mendapat laporan implementasi kebijakan remedial teaching.

Rujukan

- Ahmadi, Abu dan Supriyono, Widodo. (2006). *Psikologi belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi. (2009) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta
Depdiknas, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dimiyati dan Mudjiono, (2010) *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iqbal, Hasan. (2006), *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Juknis Pembelajaran Tuntas, Remedial, dan Pengayaan SMA, (2010) Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah-Direktorat Pembinaan SMA.
- Juknis Penetapan Kreteria Ketuntasan Minimal, (2010) Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah-Direktorat Pembinaan SMA.
- Makmun, Abin Syamsuddin. (2009). *Psikologi Kependidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Cetakan Kedua Puluh Sembilan)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, (2008) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nazir, Moh. (2006) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Sudjana, Nana. (2008) *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R dan Nugroho, Riant. (2009) *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, Moh. Uzer dan Setiawati, Lilis. (2008) *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Wijaya, Cece. (2008) *Pendidikan Remedial, Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Winarno, Budi. (2012) *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo